

Tata Kelola Pariwisata Berbasis Komunitas Lokal di Pantai Holtekam Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua

Y. Gabriel Maniagasi¹, Grace. N. Maniagasi², Daud Erari³, Leo Somilena⁴

Universitas Cenderawasih, Indonesia^{1'2'3'4}

Email Korespondensi Author: gabrielpapua34@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Kata kunci:

Pengelolaan; Pariwisata;
Komunitas Lokal.

Abstrak

Tujuan penelitian menganalisis pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal di pantai Holtekam distrik Muara Tami Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan Adalah pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, berdasarkan kriteria relevansi dan keterlibatan dalam aktivitas pariwisata di kawasan pantai Holtekam. Informan kunci, yakni tokoh masyarakat, pengelola obyek wisata, pelaku usaha kecil pariwisata (penjual makanan/minuman), dan aparat kampung. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal di pantai Holtekam Kota Jayapura dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat lokal; kepemilikan terhadap aset wisata; penguatan kelembagaan lokal; pengakuan terhadap nilai budaya lokal; distribusi manfaat ekonomi secara adil dan sejalan dengan kearifan lokal dan struktur sosial. Faktor pendukung, yakni adanya inisiatif; adanya kemampuan walau terbatas; bermodalkan semangat dan daya juang; adanya *goodwill* pemerintah, sedangkan faktor penghambat, yakni rendahnya kapasitas SDM lokal dalam urusan pariwisata; rendahnya kemampuan mengelola dan memasarkan destinasi wisata secara profesional; belum maksimal keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan pemerintah bagi usaha wisata berbasis komunitas lokal; belum ada kelembagaan lokal yang khusus memberi perhatian pada pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas lokal; lemahnya kemampuan membangun jaringan guna pemasaran destinasi wisata yang lebih luas.

Keywords:

Management; Tourism;
Local Community.

Abstrack

The purpose of this study is to analyze local community-based tourism management and identify the supporting and inhibiting factors of local community-based tourism management on Holtekam Beach in the Muara Tami district of Jayapura City. The research method used is a qualitative approach. Informants in the research were determined through purposive sampling techniques, based on criteria of relevance and involvement in tourism activities in the Holtekam beach area. Key informants included community leaders, tourist attraction managers, small tourism business operators (food/beverage vendors), and village officials. Data was collected through interviews, participatory observation, and documentation. Data analysis was conducted in stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results of the study show that the success of community-based tourism management on Holtekam Beach in Jayapura City is influenced by the participation of the local community; ownership of tourism assets; strengthening of local institutions; recognition of local cultural values; and fair distribution of economic benefits in line with local wisdom and social structures. Supporting factors include the existence of initiatives; limited capabilities; enthusiasm and fighting spirit; and goodwill from the government. Meanwhile, inhibiting factors include the low capacity of local human resources in tourism; low ability to professionally manage and market tourist destinations; insufficient government support, protection, and empowerment for community-based tourism businesses; the absence of local institutions specifically focused on developing community-based tourism destinations; and weak networking capabilities for broader tourism destination marketing.

Pendahuluan

Pariwisata adalah salah satu sektor penting yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangan terkini, pendekatan manajemen pariwisata berbasis masyarakat (Community-Based Tourism/CBT) semakin banyak diterapkan karena dianggap mampu meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan, serta menjaga keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan (Suansri, 2003; UNWTO, 2019). Kota Jayapura, yang berfungsi sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia Timur, memiliki beragam sumber daya alam dan budaya yang kaya, dengan Pantai Holtekam sebagai salah satu destinasi wisata utama. Namun, potensi ini hingga saat ini belum dikelola secara optimal karena kurangnya keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai pengelola utama pariwisata.

Pantai Holtekam menarik perhatian wisatawan berkat keindahan alam pesisir dan kekayaan budaya masyarakat setempat, terutama komunitas adat Port Numbay. Namun, pengelolaan destinasi ini masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang lebih mengutamakan pemerintah daerah dan pelaku usaha dari luar komunitas. Dominasi ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan strategis serta pengelolaan langsung destinasi wisata. Akibatnya, manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat setempat, menciptakan ketimpangan dalam distribusi manfaat pariwisata (Tosun, 2006).

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata sangat penting, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap nilai-nilai budaya dan keberlanjutan lingkungan. Pengembangan pariwisata yang tidak berorientasi pada keberlanjutan berisiko menghilangkan karakter lokal, merusak ekosistem pesisir, serta memicu konflik sosial dan marginalisasi masyarakat adat (Bramwell & Lane, 2011). Tanpa pengelolaan yang partisipatif dan inklusif, destinasi wisata seperti Pantai Holtekam berisiko mengalami kerusakan lingkungan dan melemahnya kohesi sosial dalam masyarakat.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan pariwisata berbasis komunitas dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat kapasitas dan kelembagaan lokal, serta mendorong pelestarian budaya dan lingkungan (Goodwin & Santilli, 2009; Scheyvens, 2011). Namun, penerapan pendekatan ini di Kota Jayapura masih menghadapi beberapa tantangan, seperti lemahnya kelembagaan lokal, keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi, permodalan, dan pelatihan, serta belum adanya model pengelolaan pariwisata berbasis komunitas yang sesuai dengan konteks sosial budaya setempat. Kondisi ini menghambat adopsi CBT secara luas dan berkelanjutan.

Kondisi sosial dan budaya masyarakat Kota Jayapura, khususnya komunitas adat Port Numbay, sangat relevan sebagai dasar dalam merancang model pengelolaan pariwisata yang inklusif. Masyarakat adat memiliki hubungan kultural dan spiritual yang kuat dengan wilayah pesisir sebagai bagian dari tanah leluhur mereka. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan pariwisata tidak hanya merupakan pengakuan terhadap hak-hak mereka, tetapi juga menjadi prasyarat penting untuk mencapai prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan (UNDRIP, 2007; Chambers, 2014).

Secara konseptual, pariwisata dipahami sebagai aktivitas perjalanan dan tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya, tidak lebih dari satu tahun berturut-turut, untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau tujuan lainnya tanpa bekerja di tempat yang dikunjungi (UNWTO, 2019). Wahab (2003) menekankan bahwa pariwisata mencakup tiga unsur utama, yaitu manusia sebagai pelaku, ruang sebagai lokasi aktivitas, dan waktu sebagai durasi perjalanan.

Pengelolaan pariwisata modern menekankan pentingnya keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial. UNWTO menegaskan bahwa pengelolaan destinasi wisata harus berbasis inklusivitas, konservasi sumber daya alam, penguatan kapasitas lokal, serta kolaborasi multi-aktor antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (UNWTO, 2019). Dalam konteks pariwisata pesisir dan bahari, pendekatan kolaboratif ini semakin relevan untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan konflik kepentingan.

Komunitas lokal terdiri dari sekelompok individu yang tinggal dalam wilayah geografis tertentu, memiliki keterikatan sosial, budaya, dan ekonomi, serta berbagi nilai dan norma bersama. Dalam pembangunan pariwisata berbasis komunitas, masyarakat lokal diposisikan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kontrol terhadap sumber daya dan distribusi manfaat ekonomi (Pretty,

1995). Modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma menjadi kekuatan utama komunitas dalam membangun kerja sama pembangunan (Putnam, 1993). Pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pariwisata. Unsur utama dalam pendekatan ini meliputi partisipasi masyarakat, kepemilikan lokal terhadap aset wisata, penguatan kelembagaan lokal, penghormatan terhadap nilai budaya dan kearifan lokal, serta distribusi manfaat ekonomi yang adil (Scheyvens, 2011).

Meskipun menjanjikan, keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas sangat bergantung pada faktor pendukung dan penghambat dalam konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Faktor pendukung meliputi partisipasi aktif masyarakat, kelembagaan lokal yang kuat, dukungan kebijakan pemerintah, serta akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Sebaliknya, faktor penghambat mencakup rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya kelembagaan, dominasi aktor eksternal, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung masyarakat adat (Tosun, 2006; Scheyvens, 2011).

Oleh karena itu, strategi pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal harus disertai dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta reformasi kebijakan dan perlindungan hukum yang menjamin hak-hak masyarakat adat sebagai pengelola sah destinasi wisata. Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam konteks Pantai Holtekam, Kota Jayapura, yang memiliki karakter masyarakat adat yang kuat dan potensi alam yang tinggi, sehingga memerlukan pengelolaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini sangat penting untuk menganalisis pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan ekologis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan kontekstual bagi pemerintah daerah serta pemangku kepentingan pariwisata lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi potensi pengembangan pariwisata berbasis komunitas lokal di Pantai Holtekam, termasuk faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, serta strategi pengelolaan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: (a) Mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan pariwisata berbasis komunitas di Pantai Holtekam, Kota Jayapura; (b) Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami praktik, dinamika sosial, dan makna yang dibangun oleh komunitas lokal dalam pengelolaan pariwisata di Pantai Holtekam, Kota Jayapura. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual (Creswell & Poth, 2018). Peneliti berusaha menangkap pandangan dan pengalaman komunitas secara mendalam.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yang memungkinkan eksplorasi realitas spesifik mengenai peran komunitas lokal dalam pengelolaan wisata di Pantai Holtekam (Yin, 2018). Lokasi penelitian dipilih karena Pantai Holtekam merupakan destinasi wisata yang dikelola secara partisipatif oleh masyarakat lokal, meskipun menghadapi tekanan dari pembangunan ekonomi.

Informan ditentukan melalui *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan mereka dalam pariwisata di kawasan tersebut, termasuk tokoh masyarakat dan pelaku usaha kecil. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menangkap narasi subjektif informan, sedangkan observasi dilakukan di lokasi untuk memahami interaksi sosial dan aktivitas wisata.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumen untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Teknik triangulasi diterapkan untuk memastikan keakuratan data. Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis bersifat deskriptif, interpretatif, dan reflektif terhadap konteks sosial budaya komunitas lokal. Setelah data diperoleh, analisis dilakukan sesuai prosedur baku, dengan pemilihan data yang relevan dan validasi melalui klarifikasi dengan informan

jika diperlukan. Proses ini memastikan bahwa kesimpulan yang diambil berdasarkan data yang sah dan memenuhi kriteria penelitian.

Hasil dan Diskusi

Penelitian ini menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Ardianto dan Setiawan (2022) sebagai alat untuk menganalisis pengelolaan destinasi wisata di Pantai Holtekam, Kota Jayapura, dengan indikator yang dijadikan sebagai instrumen analisis. Indikator tersebut mencakup partisipasi masyarakat lokal, kepemilikan lokal terhadap aset wisata, penguatan kelembagaan lokal, pengakuan terhadap nilai-nilai budaya, serta distribusi manfaat ekonomi yang adil dan sejalan dengan kearifan lokal serta struktur sosial, serta factor pendukung dan penghambat pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal.

Pengelolaan Pariwisata Berbasis Komunitas Lokal

1. Partisipasi Masyarakat Lokal

Dalam konteks pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal, partisipasi masyarakat mencakup upaya kolektif dalam mengatur tata kelola wisata yang adil, transparan, dan inklusif. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui forum musyawarah atau lembaga adat, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan destinasi wisata. Hal ini penting untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan oleh pihak luar atau investor yang lebih fokus pada keuntungan ekonomi tanpa memberi ruang bagi kelestarian lingkungan, pengamanan sosial, dan inklusivitas budaya lokal (Hampton & Jeyacheya, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Holtekam cukup terbuka. Keterlibatan ini terwujud melalui inisiatif masyarakat yang secara mandiri mengembangkan usaha pariwisata dengan memanfaatkan keterampilan, modal sosial, dan sumber daya yang ada. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata tidak berlangsung melalui mekanisme formal kelembagaan, tetapi berkembang secara swadaya dengan dukungan dari keluarga inti yang memiliki akses terhadap hak ulayat.

Dalam konteks masyarakat adat Port Numbay, hak ulayat mencakup tidak hanya wilayah daratan, tetapi juga wilayah pesisir yang secara turun-temurun dikuasai oleh marga tertentu. Penguasaan wilayah adat ini memberikan legitimasi sosial bagi keluarga pemilik hak ulayat untuk mendistribusikan pemanfaatan lahan kepada anggota keluarga agar dikelola sebagai sumber penghidupan. Beberapa wilayah yang memiliki potensi ekonomi dimanfaatkan untuk kegiatan wisata, sehingga tanah adat berfungsi sebagai aset produktif bagi keluarga dan komunitas.

Lebih lanjut, pengelolaan destinasi wisata Pantai Holtekam didominasi oleh peran pemilik hak ulayat dan struktur adat, sementara pemerintah kampung tidak melakukan intervensi langsung dalam pengelolaan operasional. Pemerintah kampung cenderung berperan sebagai fasilitator dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat lokal. Temuan ini menegaskan bahwa struktur adat, kepemilikan hak ulayat, dan relasi kekeluargaan merupakan faktor utama yang membentuk pola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Holtekam.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat adat dalam mengelola potensi sumber daya alam sangat terbuka. Artinya, mereka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola dengan kemampuan yang ada sehingga dapat menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing. Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, ditemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas cukup terlihat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menyadari bahwa lokasi pantai (masuk dalam wilayah ulayatnya) memiliki "daya tarik" sebagai syarat untuk dijadikan destinasi wisata, sehingga mereka berupaya sebisanya untuk "berkontribusi" dalam proses pengelolaan pariwisata meskipun berskala kecil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal di Pantai Holtekam memberi ruang dan kesempatan bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi. Namun, keterlibatan masyarakat tidak dalam konteks komunitas atau kelembagaan, melainkan bersifat individu atau personal, terbatas pada keluarga pemilik ulayat.

2. Kepemilikan Lokal Terhadap Aset Wisata

Secara teori, pariwisata melibatkan banyak aspek yang saling berkaitan. Keterkaitan tersebut mencakup daya tarik (obyek wisata), akses lokasi, penyediaan hiburan, cinderamata, keamanan, dan fasilitas sederhana seperti toilet. Aspek-aspek ini berperan penting dalam keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal. Artinya, untuk mencapainya, komunitas lokal pengelola perlu menyediakan aspek-aspek tersebut agar daya tarik yang ada dapat menjadi nilai ekonomi dan sumber pendapatan masyarakat. Namun, persoalan yang muncul adalah minimnya ketersediaan aspek-aspek yang mendukung pencapaian keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal. Kepemilikan terhadap aset-aset untuk mendukung pengelolaan pariwisata masih terbatas, sehingga belum memungkinkan untuk menjadi industri pariwisata berskala besar.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Pantai Holtekam mengusahakan kepemilikan dan penguasaan aset wisata secara mandiri dengan dukungan yang kuat dari struktur adat. Aset wisata utama yang dimiliki oleh masyarakat adalah lahan untuk usaha, yang digunakan untuk mendirikan sarana sederhana seperti para-para yang mendukung aktivitas wisata. Lahan tersebut diperoleh melalui pemberian hak pemanfaatan dari kepala suku yang memiliki hak ulayat, dengan ketentuan yang bersifat mengikat, yaitu lahan hanya boleh dikelola sebagai sumber penghidupan keluarga dan tidak boleh dijual atau dialihkan kepada pihak lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset wisata yang berbasis adat diarahkan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga serta mempertahankan kepemilikan kolektif atas tanah adat.

Dukungan dari pihak adat terhadap keberlanjutan hidup masyarakat terlihat dari distribusi kewenangan pemanfaatan aset wisata sebagai sumber pendapatan. Pemberian akses lahan oleh kepala suku didasarkan pada pertimbangan sosial dan kemanusiaan untuk membuka peluang usaha bagi anggota komunitas. Namun demikian, kapasitas masyarakat dalam mengelola aset wisata masih terbatas, yang terlihat dari kondisi sarana prasarana wisata yang belum memadai, seperti para-para yang tidak memiliki atap pelindung sehingga kurang nyaman bagi pengunjung.

Selain dukungan dari pihak adat, terdapat juga dukungan dari pemerintah dalam bentuk penyediaan aset dan fasilitas wisata melalui instansi teknis yang terkait. Namun, dukungan ini belum diikuti dengan penyerahan kewenangan pengelolaan secara penuh kepada masyarakat yang memiliki lokasi. Akibatnya, beberapa fasilitas yang telah dibangun tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal di Pantai Holtekam. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara penyediaan infrastruktur oleh pemerintah dan pemberdayaan masyarakat sebagai pengelola utama destinasi wisata.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan penting untuk mendukung aktivitas wisata pesisir. Penyediaan air bersih umumnya dilakukan secara mandiri oleh pengelola melalui penampungan air dalam berbagai ukuran. Di beberapa lokasi, bantuan sarana pendukung berupa tong air bersih dari instansi pemerintah juga melengkapi upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar pengunjung. Meskipun demikian, pemanfaatan fasilitas tersebut masih bergantung pada inisiatif dan kemampuan pengelola lokal, sehingga perlu adanya penguatan dukungan kebijakan dan pengelolaan agar aset wisata yang ada dapat berfungsi secara berkelanjutan dan optimal.

Aset-aset wisata yang dimiliki sebagai pendukung untuk kesuksesan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal di Pantai Holtekam, Kota Jayapura. Namun, kendala yang dihadapi masyarakat lokal cukup beragam, di antaranya lemahnya manajemen usaha pariwisata, kurangnya fasilitas pendukung, dan minimnya wawasan terkait pengelolaan pariwisata berkelanjutan sebagai sebuah industri yang perlu didukung dari berbagai aspek, termasuk oleh pemerintah dan sektor-sektor lainnya.

Meskipun idealnya demikian, perlu dipahami bahwa umumnya orang berkunjung ke Pantai Holtekam adalah untuk menikmati keindahan pantai dan merasakan kesegaran berendam di air laut. Oleh karena itu, kebutuhan ini perlu direspon dengan melihatnya sebagai peluang usaha wisata yang bernilai ekonomi bagi masyarakat lokal. Apalagi, pantai di Holtekam secara alami memiliki keindahan khas yang belum dikelola secara profesional sehingga dapat mendorong sektor perekonomian daerah.

Dari temuan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan lokal terhadap aset wisata di Pantai Holtekam perlu menjadi perhatian tersendiri karena kepemilikan terhadap aset-aset wisata masih terbatas. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dalam hal pengelolaan pariwisata berbasis komunitas, perlu dibarengi dengan dukungan aspek-

aspek penting lainnya yang dapat menjadi penunjang bagi kesuksesan pengelolaan pariwisata sebagai peluang dan kesempatan usaha bagi masyarakat lokal, khususnya pemilik wilayah ulayat.

3. Penguatan Kelembagaan Lokal

Fakta menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata oleh pelaku usaha pariwisata memerlukan dukungan untuk keberlanjutan dan pengembangan usaha wisata dalam skala lokal. Kebutuhan akan dukungan menjadi penting karena tanpa adanya penguatan secara individu, kelompok, organisasi, maupun kelembagaan, dapat menciptakan jurang kesenjangan yang semakin lebar. Dalam konteks penelitian ini, pelaku usaha pariwisata di Pantai Holtekam sangat membutuhkan dukungan berupa penguatan kapasitas untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif. Pengembangan ini tidak terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga meluas pada aspek sosial dan lingkungan. Pengembangan kapasitas kelembagaan merujuk pada proses meningkatkan kemampuan lembaga, baik secara formal maupun informal, untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif dan terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (pengetahuan, pola pikir, motivasi, dan komitmen) (Maniagasi, 2021) serta proses yang mendukung pengelolaan pariwisata.

Secara umum, kelembagaan yang mapan dapat membantu masyarakat dalam mengelola pariwisata dengan cara-cara yang baku dan berkelanjutan, sehingga manfaat ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat lokal dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap sumber daya pariwisata. Secara konseptual, ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan pengembangan kapasitas kelembagaan lokal dalam perspektif pengelolaan pariwisata berbasis komunitas, antara lain: (1) pendidikan dan pelatihan. Masyarakat lokal atau pemilik usaha pariwisata perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan dalam mengelola pariwisata, termasuk pengalaman dalam manajemen destinasi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan; (2) membentuk kelompok usaha wisata (organisasi komunitas). Komunitas yang dibentuk ini dapat membantu masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pariwisata; (3) pengembangan infrastruktur (fasilitas pendukung). Perlu ada intervensi dalam hal infrastruktur dasar, seperti akses jalan, sanitasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang terkait dengan pengelolaan pariwisata; (4) kolaborasi bersama stakeholder. Membangun kemitraan bersama pemerintah, LSM, perguruan tinggi, sektor swasta, dan komunitas lokal guna memberi dukungan bagi pengembangan kapasitas kelembagaan untuk pengelolaan pariwisata berbasis komunitas; (5) implementasi kebijakan yang mendukung pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal. Diperlukan regulasi yang dapat mendukung hal ini, seperti kebijakan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara konsep ideal pengelolaan pariwisata yang berbasis komunitas dan realitas yang ada di Pantai Holtekam. Dari segi konsep, pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat menekankan pentingnya pembentukan kelompok atau kelembagaan lokal yang terorganisir, seperti komunitas pariwisata, kelompok pengelola destinasi, atau koperasi wisata. Namun, dalam praktiknya, keberadaan lembaga tersebut belum ditemukan di Pantai Holtekam. Pengelolaan destinasi wisata masih dilakukan secara terpisah dan individual, di mana setiap pelaku usaha beroperasi tanpa adanya koordinasi yang terencana.

Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan destinasi wisata. Para pengelola belum pernah mendapatkan pelatihan teknis, bimbingan, atau pendampingan yang berkelanjutan terkait dengan pengelolaan pariwisata. Ketidakadaan akses terhadap komunitas atau jaringan pengelola wisata menyebabkan pengembangan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan pengelola destinasi masih bersifat otodidak dan terbatas pada pengalaman pribadi.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi dukungan eksternal kepada para pelaku usaha pariwisata. Beberapa pengelola mengungkapkan bahwa mereka belum pernah menerima bantuan dari pemerintah maupun sektor swasta, baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan, maupun partisipasi dalam kegiatan promosi dan event pariwisata. Di sisi lain, terdapat juga pengelola yang mendapatkan bantuan terbatas berupa penyediaan sarana dan prasarana wisata dari pemerintah desa maupun instansi teknis terkait. Perbedaan pengalaman ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah terhadap pengelolaan destinasi wisata Pantai Holtekam belum merata

dan belum terintegrasi dalam suatu skema pemberdayaan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan.

Temuan ini menekankan bahwa penguatan kelembagaan lokal, peningkatan kapasitas pengelola, serta konsistensi dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas yang efektif dan berkelanjutan di Pantai Holtekam.

Terkait bantuan dan dukungan untuk pengembangan kelembagaan dalam urusan tata kelola pariwisata berbasis komunitas lokal, perlu ada. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah penguatan kapasitas, sehingga dengan adanya dukungan seperti itu justru memberi ruang bagi mereka untuk memberdayakan diri dengan sumber daya yang ada sehingga potensi sumber daya pariwisata dapat dikelola dengan dukungan fasilitas, pelatihan, dan keikutsertaan dalam event pariwisata yang juga memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam mencapai kesejahteraan.

Dukungan dan bantuan umumnya dapat diperoleh ketika ada keterbukaan untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Kemampuan menjalin komunikasi tentu saja diperoleh melalui pengalaman. Secara teori, pengalaman seseorang dibentuk oleh pendidikan dan keterampilan yang diperoleh di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Dengan bekal pendidikan dan pengalaman, seseorang akan mampu menjalin komunikasi dengan berbagai komponen untuk membangun relasi. Kedekatan, pengalaman, dan pendidikan seseorang dapat menjadi "energi" bagi seseorang untuk memberdayakan diri dalam menguatkan kapasitas diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal di Pantai Holtekam, Kota Jayapura dapat dilakukan melalui pendidikan, pengalaman, dan pembentukan organisasi atau komunitas lokal pengusaha pariwisata serta membangun kolaborasi dengan berbagai mitra. Jalinan kemitraan ini dapat menjadi perekat sehingga semua dukungan dapat menjadi "*tools*" yang efektif untuk mengelola pariwisata yang berkelanjutan, bermanfaat secara ekonomi dan sosial budaya, serta mampu melindungi lingkungan meskipun telah dieksploitasi untuk kepentingan umat manusia.

4. Pengakuan Terhadap Nilai-Nilai Budaya

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas di Pantai Holtekam. Dari segi budaya, masyarakat setempat memiliki kekayaan nilai dan praktik yang berpotensi menjadi aset strategis dalam pengembangan sektor pariwisata. Nilai-nilai budaya tersebut seharusnya diintegrasikan dengan daya tarik alam pantai untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi serta daya saing destinasi wisata.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman pengelola pariwisata lokal mengenai kepariwisataan masih terbatas. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan produk wisata, terutama dalam mengemas unsur-unsur budaya lokal sebagai bagian dari daya tarik wisata. Pengelola destinasi wisata cenderung melihat potensi wisata secara sempit, hanya terbatas pada pemanfaatan ruang pantai sebagai lokasi rekreasi, tanpa mengaitkannya dengan kekayaan budaya masyarakat setempat.

Kondisi ini mengakibatkan potensi budaya yang dimiliki masyarakat belum berfungsi sebagai aset strategis dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal. Padahal, pengintegrasian aspek kultural dengan keindahan alam pantai memiliki peluang untuk menciptakan paket wisata yang bernilai ekonomi sekaligus memperkuat identitas lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa belum adanya pengarusutamaan nilai-nilai budaya dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Holtekam menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan di Kota Jayapura.

5. Distribusi Manfaat Ekonomi Secara Adil dan Sejalan dengan Kearifan Lokal dan Struktur Sosial

Mengenai distribusi manfaat ekonomi, tampaknya bukanlah perkara yang mudah dan selalu terkait dengan peluang serta kesempatan ekonomi. Bagi sebagian orang, meraih peluang ekonomi sangat mudah, tetapi ada juga yang tidak mampu membaca dan melihat potensi tertentu sebagai peluang ekonomi. Hal ini tentu disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pengalaman dalam melihat serta menangkap peluang-peluang usaha di bidang pariwisata.

Ketika membahas pariwisata, terdapat banyak aspek yang tercakup. Tidak hanya terbatas pada aspek keindahan, tetapi juga kompleks. Baik aspek kebijakan, teknis operasional, termasuk tata kelola, regulatif, dan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan. Semua aspek ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Aspek-aspek ini memiliki keterkaitan dan terhubung untuk membentuk sistem pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata memerlukan kolaborasi lintas sektoral untuk mencapai tujuan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dalam aspek ekonomi, sosial budaya, kearifan lokal, dan struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, manfaat ekonomi dari pariwisata seharusnya terdistribusi secara merata kepada semua masyarakat, khususnya komunitas lokal di Pantai Holtekam, Kota Jayapura. Sayangnya, dalam konteks penelitian ini ditemukan bahwa aspek-aspek tersebut belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat, terutama penduduk asli sebagai pemilik sumber daya pariwisata.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa inisiatif masyarakat dalam mengelola destinasi wisata Pantai Holtekam didorong oleh keinginan untuk menjalankan usaha secara mandiri berdasarkan pengalaman dan sudut pandang mereka sendiri. Masyarakat setempat memulai usaha pariwisata dengan memanfaatkan keterampilan yang ada serta belajar dari pengalaman sebelumnya, meskipun tanpa dukungan pengetahuan teknis dan manajerial yang cukup. Pengalaman pribadi menjadi aset penting dalam memanfaatkan peluang ekonomi dan mendorong keberanian untuk memulai usaha pariwisata sebagai sumber penghidupan dengan mengoptimalkan potensi lingkungan sekitar secara mandiri, tanpa bergantung pada pihak luar.

Salah satu temuan signifikan adalah penerapan prinsip kebersihan dan pengelolaan sampah sebagai bagian dari praktik pengelolaan destinasi wisata. Para pengelola destinasi wisata menganggap kebersihan lingkungan sebagai faktor utama dalam meningkatkan daya tarik wisata pantai. Pengalaman sebelumnya dalam pengelolaan lingkungan dijadikan acuan dalam menjaga kebersihan area wisata, sehingga praktik pengelolaan sampah dilakukan secara sadar dan berkesinambungan.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kapasitas pengelolaan destinasi wisata masih terbatas, terdapat kesadaran ekologis yang cukup kuat di kalangan pengelola lokal. Kebersihan dan pengelolaan sampah dipahami tidak hanya sebagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan keseimbangan ekologi. Kesadaran ini menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan di Pantai Holtekam.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dimaknai bahwa distribusi keadilan ekonomi ini belum terlihat merata. Artinya, kesempatan untuk menikmati manfaat ekonomi dari destinasi wisata Pantai Holtekam belum sepenuhnya memberi manfaat yang signifikan bagi komunitas lokal, terutama masyarakat adat pemilik wilayah ulayat. Hal ini disebabkan oleh lemahnya daya dukung terhadap aspek-aspek yang telah disebutkan, sehingga diperlukan penguatan kapasitas baik secara internal (individu) maupun eksternal (kelompok dan organisasi) dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal di Pantai Holtekam, Kota Jayapura.

Penguatan kapasitas internal meliputi penguatan sumber daya manusia, termasuk pengetahuan, pola pikir, motivasi, dan komitmen. Sedangkan penguatan kapasitas eksternal (kelompok dan organisasi) mencakup legalitas atau aspek regulatif, kolaborasi, dukungan anggaran, dan nilai-nilai budaya lokal. Dukungan ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi penduduk lokal dengan memperhatikan kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur yang harus diangkat dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas di Pantai Holtekam, sehingga kesejahteraan yang diidam-idamkan dapat terwujud. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas lokal di Pantai Holtekam belum sepenuhnya menciptakan keadilan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi komunitas lokal.

Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pengelolaan Pariwisata Berbasis Komunitas Lokal di Pantai Holtekam, Kota Jayapura

1. Faktor-Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor yang dianggap mendukung pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas di Pantai Holtekam, Kota Jayapura, sebagai berikut:

a) Adanya Inisiatif

Inisiatif merupakan dorongan internal dari individu atau kelompok untuk bertindak demi mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pengelolaan destinasi pariwisata berbasis komunitas di Pantai Holtekam, inisiatif masyarakat muncul secara mandiri sebagai reaksi terhadap peluang ekonomi yang ditawarkan oleh potensi wisata pantai. Masyarakat setempat mampu mengidentifikasi nilai ekonomis dari sumber daya yang tersedia dan berusaha untuk mengelolanya meskipun dengan kemampuan yang terbatas, dengan harapan dapat memperoleh manfaat ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Inisiatif ini diwujudkan melalui pendirian dan pengelolaan usaha pondok wisata secara mandiri, meskipun belum didukung oleh kelembagaan kelompok usaha wisata yang terstruktur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa melalui inisiatif individu, masyarakat berhasil mengembangkan sejumlah pondok wisata yang disewakan kepada pengunjung, dengan sebagian di antaranya mendapat dukungan terbatas dari pemerintah desa. Hal ini menegaskan bahwa inisiatif lokal menjadi faktor krusial dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas di Pantai Holtekam, meskipun masih menghadapi keterbatasan kapasitas dan dukungan kelembagaan.

b) Kemampuan yang Terbatas

Kemampuan masyarakat dalam mengelola destinasi wisata umumnya terbentuk melalui pengalaman yang didapat secara informal. Pengalaman ini diperoleh dari proses pembelajaran nonformal melalui observasi, keterlibatan langsung, serta interaksi dengan praktik pengelolaan wisata di sekitar maupun di daerah lain. Berdasarkan pengalaman tersebut, masyarakat berusaha untuk memulai dan mengelola usaha wisata secara mandiri dengan mengandalkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkembang secara bertahap. Meskipun kemampuan yang dimiliki masih terbatas dan belum didukung oleh pendidikan atau pelatihan pariwisata yang memadai, masyarakat mampu menempatkan diri sebagai pelaku usaha wisata berskala lokal. Keberadaan pelaku usaha ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pariwisata lokal di Kota Jayapura, sekaligus mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengorganisasi diri dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada.

c) Modal Semangat dan Daya Juang

Semangat dan ketahanan masyarakat menjadi elemen krusial dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal di Pantai Holtekam. Energi positif ini berfungsi sebagai pendorong yang memotivasi masyarakat untuk beraksi, bertahan, dan berupaya mengembangkan usaha pariwisata meskipun dalam keterbatasan fasilitas. Kesadaran akan potensi lokal, terutama hak ulayat atas kawasan pantai, mendorong masyarakat untuk tidak menyerahkan pengelolaan destinasi wisata kepada pihak luar. Dengan semangat untuk mempertahankan hak warisan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, para pemilik ulayat berusaha mengelola daya tarik Pantai Holtekam secara mandiri, meskipun dilakukan dengan cara yang sederhana dan bertahap sesuai dengan kapasitas yang ada. Temuan ini menunjukkan bahwa semangat dan ketahanan masyarakat adalah modal sosial yang kuat dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal di Pantai Holtekam.

d) Adanya Goodwill Pemerintah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa niat baik pemerintah dalam mengembangkan pariwisata yang berbasis komunitas lokal di Pantai Holtekam belum terlihat dengan jelas dalam kebijakan Pemerintah Kota Jayapura. Meskipun kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua secara normatif memberikan mandat untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat adat, perempuan, dan peningkatan kerukunan hidup beragama, pelaksanaannya dalam sektor pariwisata masih belum sepenuhnya mendukung masyarakat lokal sebagai pengelola utama destinasi wisata. Arah pengembangan pariwisata cenderung mengedepankan pemerintah sebagai aktor utama, sementara peran masyarakat pemilik hak ulayat berpotensi beralih menjadi pihak yang terlibat melalui mekanisme bagi hasil. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan daerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemberdayaan dan perlindungan hak masyarakat adat sesuai dengan semangat Otonomi Khusus. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih afirmatif dan inklusif agar pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal dapat memberikan manfaat yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat asli Papua.

2. Faktor-Faktor Penghambat

Selain faktor-faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan faktor-faktor penghambat pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal di Pantai Holtekam, Kota Jayapura, sebagai berikut:

a) Rendahnya Kapasitas SDM Lokal dalam Urusan Pariwisata

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dapat dinilai melalui tingkat pengetahuan, pola pikir, motivasi, dan komitmen. Pengetahuan menggambarkan sejauh mana para pengelola destinasi wisata memahami konsep-konsep dasar terkait pariwisata. Namun, dalam konteks penelitian ini, pengelolaan pariwisata berbasis komunitas di Pantai Holtekam dilakukan oleh individu yang umumnya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengelola pariwisata secara profesional. Akibatnya, meskipun destinasi wisata tersebut memiliki daya tarik yang sangat menawan, pengelolaannya terkesan biasa-biasa saja tanpa sentuhan atribut yang dapat meningkatkan daya tarik wisata lokal. Dengan keterbatasan kapasitas SDM, kemampuan untuk mengelola destinasi yang memiliki daya tarik tinggi justru menyebabkan pengunjung semakin berkurang. Situasi ini perlu mendapat perhatian serius agar penguatan kapasitas pengelola destinasi wisata berbasis komunitas lokal melalui pendidikan dan pelatihan menjadi prioritas yang mendesak dan harus dilaksanakan.

b) Rendahnya Kemampuan Mengelola dan Memasarkan Destinasi Wisata Secara Profesional

Rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan berpengaruh terhadap pengelolaan destinasi wisata Pantai Holtekam. Kurangnya pengetahuan khusus mengenai pariwisata menjadi faktor utama lemahnya pengelolaan sektor ini. Untuk meraih keberhasilan dalam pengelolaan pariwisata yang berbasis komunitas lokal, para pengelola perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Pengetahuan yang cukup akan mendorong mereka untuk menciptakan inovasi baru dalam mendukung pengelolaan destinasi wisata. Ketersediaan fasilitas pendukung utama seperti toilet, kuliner khas, area parkir yang aman, dan pelayanan yang ramah sangat penting untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata.

c) Belum Maksimalnya Keberpihakan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Pemerintah bagi Usaha Wisata Berbasis Komunitas Lokal

Dalam konteks Otonomi Khusus Papua, perhatian terhadap keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi masyarakat asli Papua merupakan hal yang sangat penting. Keberpihakan diartikan sebagai dukungan positif kepada masyarakat asli Papua dalam proses pengambilan kebijakan. Perlindungan bertujuan untuk menjaga masyarakat asli Papua dari tindakan diskriminatif dan kekerasan yang bersifat politik. Sementara itu, pemberdayaan berarti memanfaatkan potensi yang ada untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Namun, dalam penelitian ini, pengelolaan pariwisata yang berbasis komunitas lokal di Pantai Holtekam belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan harus dilakukan dengan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

d) Belum Ada Kelembagaan Lokal yang Khusus Memberi Perhatian pada Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Komunitas Lokal

Pengelolaan pariwisata yang berfokus pada komunitas lokal di Pantai Holtekam harus didukung oleh lembaga-lembaga lokal yang berperan sebagai platform untuk mendorong partisipasi serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan kapasitas komunitas setempat. Ini sangat penting agar para pelaku usaha dapat bersatu dan lebih mudah dalam membangun jaringan serta kerjasama investasi untuk pengembangan bisnis pariwisata yang lebih luas. Namun, secara nyata, hingga saat ini belum ada lembaga lokal resmi yang didirikan untuk meningkatkan kapasitas lokal di sektor pariwisata di Pantai Holtekam, Kota Jayapura.

e) Lemahnya Kemampuan Membangun Jaringan (Networking) untuk Pemasaran Destinasi Wisata yang Lebih Luas

Pengembangan pariwisata yang berfokus pada komunitas lokal di Kota Jayapura hingga saat ini masih belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, pola pikir, motivasi, serta niat berusaha masyarakat yang cenderung bersifat individual dan belum diimbangi dengan kesadaran untuk membangun jaringan kerja sama dengan pihak lain. Pengelolaan destinasi wisata dilakukan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya dan modal yang ada, terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dalam jangka pendek. Pola pengelolaan seperti ini mengakibatkan terbatasnya akses terhadap dukungan teknis, permodalan, dan

penguatan kapasitas yang seharusnya bisa diperoleh melalui kolaborasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, sikap pengelolaan yang sepenuhnya mengandalkan kemampuan sendiri menjadi kurang relevan dalam konteks pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, mengingat peran pemerintah sebagai mitra strategis sangat penting untuk mendorong penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan jaringan dan pasar pariwisata berbasis komunitas lokal.

Kesimpulan

Keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas di Pantai Holtekam, Jayapura, dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yang saling terkait. Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sangat penting, terutama jika masyarakat memiliki kepemilikan terhadap aset wisata. Penguatan kelembagaan lokal, seperti kelompok sadar wisata dan koperasi, juga berperan dalam menciptakan tata kelola yang berkelanjutan. Pengakuan terhadap nilai budaya dan kearifan lokal menjadi dasar pengelolaan pariwisata untuk menjaga identitas dan mencegah konflik. Distribusi manfaat ekonomi yang adil juga penting agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komunitas.

Dalam praktiknya, pengelolaan pariwisata di Pantai Holtekam didukung oleh inisiatif masyarakat untuk terlibat meski terbatas, serta pengetahuan dasar dalam pengelolaan wisata. Dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan pendampingan juga memberikan ruang bagi pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Namun, ada tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen destinasi dan pemasaran. Keberpihakan dan dukungan pemerintah terhadap usaha wisata komunitas juga belum optimal, dan ketiadaan kelembagaan yang fokus pada pengembangan pariwisata berbasis komunitas menjadi kendala. Selain itu, lemahnya kemampuan masyarakat dalam membangun jejaring dengan pihak eksternal menghambat pemasaran destinasi.

Referensi

- Ardianto, R., & Setiawan, B. (2022). Pengelolaan pariwisata berbasis komunitas sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 14(2), 115–130.
- Basri, M. (2021). Kepemilikan aset lokal dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir dalam pengembangan pariwisata. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 45–58.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 411–421. <https://doi.org/10.1080/09669582.2010.531503>
- Chambers, R. (2014). *Rural development: Putting the last first*. London: Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fadli, A., & Ridwan, M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(3), 233–247.
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). Community-based tourism: A success? *ICRT Occasional Paper No. 11*. Leeds: International Centre for Responsible Tourism.
- Hampton, M. P., & Jeyacheya, J. (2021). Power, ownership and tourism in small islands: Evidence from Indonesia. *World Development*, 140, 105261. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105261>
- Maniagasi, A. (2021). Pengembangan kapasitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 178–192.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Pretty, J. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00024-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00024-F)
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Scheyvens, R. (2011). *Tourism and poverty*. London: Routledge.
- Sihite, R., & Panggabean, S. (2023). Kelembagaan komunitas dan keberlanjutan pariwisata lokal. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(1), 89–104.
- Suansri, P. (2003). *Community based tourism handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tours (REST).
- Suansri, P. (2020). Community-based tourism and sustainable development. *Tourism Planning & Development*, 17(4), 456–472. <https://doi.org/10.1080/21568316.2020.1745861>
- Tosun, C. (2006). Expected nature of community participation in tourism development. *Tourism Management*, 27(3), 493–504. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.08.001>
- United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). (2007). United Nations.
- World Tourism Organization (UNWTO). (2019). *International tourism highlights*. Madrid: World Tourism Organization.
- Wahab, S. (2003). *Manajemen kepariwisataan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wenno, I. H. (2017). Motivasi dan inisiatif masyarakat dalam pengembangan usaha berbasis lokal. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(2), 101–112.